

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2026
NOMOR: 300.2.10/53/425.206/2026

A. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ARSIP	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	Kegiatan Monev Ormas dan Partai Politik	Kunjungan kegiatan ke sekretariat Ormas ataupun Parpol dalam rangka monitoring dan evaluasi maupun koordinasi	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	H+1 setelah pelaksanaan kegiatan	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun	Dokumen/ tatap muka
2	Ringkasan informasi tentang kinerja	LKJIP, Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan dan IKU (Indikator Kinerja Utama)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama masih berlaku	Dokumen/ tatap muka
3	Dokumen SOP Perangkat Daerah	Informasi terkait Standar Operasional Prosedur pelayanan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama masih berlaku	Dokumen/ tatap muka

B. INFORMASI YANG SERTA MERTA

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ARSIP	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	Informasi tentang potensi konflik	Potensi-potensi konflik di Kota Probolinggo yang dipengaruhi oleh isu - isu lokal, regional dan nasional yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama masih berlaku	Dokumen/ tatap muka

C. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ARSIP	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	Lapor Keberadaan Online	-Pemberian Informasi Ormas Terdata di Kemendagri -Data Ormas yang ada di Bakesbangpol Kota Probolinggo -Cara Melakukan Pendaftaran Ormas (untuk mengetahui Izin Ormas Ke Kemenkumham dan untuk melaporkan keberadaan ormas secara online)	Bidang Poldagri Ormas	2025	Soft copy	Selama masih berlaku	Website
2	Info Pengawasan Ormas	-Pemberian Informasi Dasar Pengawasan Ormas -Data Ormas yang ada di Bakesbangpol Kota Probolinggo -Informasi siapa saja anggota tim terpadu pengawasan ormas -Untuk melaporkan ormas yang diduga melakukan pelanggaran oleh masyarakat secara online	Bidang Poldagri Ormas	2025	Soft copy	Selama masih berlaku	Website
3	Info Partai politik	-Pemberian Informasi Partai Politik di Wilayah Kota Probolinggo -Peraturan terkait partai politik -Cara Melakukan Pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar untuk Partai Politik yang baru berdiri -Untuk mengetahui Partai Politik Peserta Pemilu sebelumnya -Untuk mengetahui Anggota DPRD Kota Probolinggo	Bidang Poldagri Ormas	2025	Soft copy	Selama masih berlaku	Website

		- Untuk mengetahui Jumlah Dana Bantuan Parpol yang diterima oleh masing-masing Partai Politik Pemenang Pemilu pada tahun berjalan					
4	Daftar Informasi Publik	Informasi terkait DIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama masih berlaku	Dokumen/ tatap muka
5	Data inventaris dan aset	Data terkait daftar inventaris BMD	Pengguna Barang	2025	Softcopy dan Hardcopy	Selama masih berlaku	Dokumen/ tatap muka

D. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		BATAS WAKTU PENGEKUALIAN
			INFORMASI DIBUKA	INFORMASI DITUTUP	
1	Data Pegawai (Biodata PNS)	UU Nomor 14 pasal 6 ayat 3.c dan pasal 17.h informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Dokumen penerima Layanan Publik	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi privasi penerima layanan dari orang lain yang tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas
3	Dokumen laporan pengaduan	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menurunkan kredibilitas dari Pemerintahan dalam pelayanan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi dimata publik	Sampai dengan Hasil penyelesaian dari laporan pengaduan
4	Draft Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) sebelum disahkan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai mendapat penetapan dari Walikota
5	Perhitungan APBD Perangkat Daerah (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD)	- Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi dimata publik	Sampai ditetapkan dalam Perda
6	Seluruh dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan tahun berjalan(sebelum di periksa/ Reviu oleh Tim APIP)	- Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Selama masih berlaku

7	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya (sebelum diperiksa/Reviu oleh Tim APIP dan Auditor)	- Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak terbatas
8	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai diterbitkan Surat Keputusan
9	Daftar penilaian prestasi kerja/ SKP PNS	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan /pihak yang berwenang
10	Sistem pengelolaan keuangan dan database pengelolaan keuangan daerah	- Pasal 17 huruf e dan huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi dimata publik	Tidak terbatas

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 28 Januari 2026
**Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Probolinggo**



Muhammad Sonhadji, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196805131992021001